



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 791-799

Transformasi Sistem Pemerintahan di Jawa Barat:
Analisis Historis dan Nilai Kearifan Lokal di Gedung Sate

Elis S. Atiah, Ani Triani, Sri A. Lestari, Mikail B. Rajasa, Arik Darojat

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial
Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia, Garut, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2527>

How to Cite this Article

APA : Sri Atiah, E., Triani, A., Lestari, S. A., Rajasa, M. B., & Darojat, A. (2024). Transformasi Sistem Pemerintahan di Jawa Barat: Analisis Historis dan Nilai Kearifan Lokal di Gedung Sate. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 791 - 799. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2527>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Transformasi Sistem Pemerintahan di Jawa Barat: *Analisis Historis dan Nilai Kearifan Lokal di Gedung Sate*

Elis Sri Atiah¹, Ani Triani², Sri Ayu Lestari³, Mikail Baskara Rajasa⁴, Arik Darajat⁵

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra,
Institut Pendidikan Indonesia, Garut, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email Korespondensi: elissri006@gmail.com

Diterima: 10-12-2024

| Disetujui: 11-12-2024

| Diterbitkan: 12-12-2024

ABSTRACT

This research analyzes the transformation of the government system in west Java, focusing on Gedung Sate as a symbol of governance and culture. Built during the Dutch colonial period, Gedung Sate serves not only as an administrative center but also as a historical landmark reflecting Sundanese local wisdom. Using a descriptive qualitative approach and a case study design, this study explores historical phases, including the Hindu-Buddhist kingdoms, Dutch colonialism, Japanese occupation and the modern era. This transformation encompasses policy evolution and the integration of local wisdom values, such as mutual cooperation (gotong royong) and community participation, into public administration processes. The findings reveal that incorporating cultural values into policies at Gedung Sate enhances government-community relations and reinforces West Java's cultural identity amidst modernization.

Keywords: Government Transformation; Gedung Sate; West Java History; Local Wisdom; Public Administration.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transformasi sistem pemerintahan di Jawa Barat dengan fokus pada Gedung Sate sebagai simbol pemerintahan dan kebudayaan. Gedung Sate yang dibangun pada masa kolonial Belanda, tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga simbol sejarah dan kearifan lokal masyarakat Sunda. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi proses historis yang melibatkan fase-fase penting dari masa kerajaan Hindu-Budha, kolonial Belanda, pendudukan Jepang hingga era modern. Transformasi ini mencakup evolusi kebijakan pemerintahan dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong dan partisipasi komunitas dalam proses administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat identitas budaya Jawa Barat di tengah modernisasi.

Katakunci: Transformasi Pemerintahan; Gedung Sate; Sejarah Jawa Barat; Kearifan Lokal; Administrasi Publik.

PENDAHULUAN

Gedung Sate merupakan simbol pemerintahan dan budaya di Jawa Barat. Transformasi sistem pemerintahan di Jawa Barat merupakan topik yang sangat relevan dan penting, terutama dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Gedung sate sebagai simbol pemerintahan dan sejarah Jawa Barat memiliki peran penting dalam proses ini. Gedung sate dibangun antara tahun 1920-1924, pada masa kolonial Belanda dan diresmikan sebagai kantor gubernur pada tahun 1930. Bangunan ini tidak hanya menjadi pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki nilai-nilai historis yang mendalam terkait dengan perkembangan sosial politik di Jawa Barat. Gedung sate memiliki arsitektur yang khas sehingga menjadi ikon kota Bandung dan simbol perjuangan masyarakat Jawa Barat.

Gedung Sate menampilkan warisan arsitektur kolonial dan menunjukkan evolusi sistem pemerintahan dari zaman kolonial Belanda hingga zaman modern. Mulai dari pemerintahan tradisional sunda, Belanda, pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia, transformasi pemerintahan Jawa Barat telah mengalami berbagai fase penting.

Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk melakukan transformasi digital dalam sistem pemerintahan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti *Internet of Things* (IoT). Diharapkan bahwa perubahan digital ini akan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Gedung sate juga menjadi simbol nilai kearifan lokal yang bertahan. Kearifan lokal mencakup tradisi, budaya dan praktik sosial yang telah ada sejak lama dan berfungsi sebagai panduan dalam interaksi sosial. Hal ini juga menjadi pertimbangan dalam proses transformasi yang dilakukan. Nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik di Gedung Sate yang dapat berfungsi sebagai tempat dimana pemerintah dan masyarakat berinteraksi. Oleh karena itu, perubahan sistem pemerintahan berkonsentrasi pada peningkatan identitas budaya dan teknologi.

Dalam (Dehayy et al., 2024) sistem pemerintahan di Jawa Barat telah mengalami proses transformasi yang panjang dimulai dari masa kerajaan dan kolonial hingga Indonesia mencapai kemerdekaan. Pada era kerajaan dan kolonial Jawa Barat memiliki sejarah panjang yang dimulai dari era kerajaan Hindu-Buddha, seperti Tarumanegara dan Pajajaran yang mempengaruhi struktur sosial dan pemerintahan dengan banyak prasasti yang mencerminkan kehidupan politik saat itu. Setelah masa kerajaan, pada tahun 1925, Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari reformasi administratif yang menandai awal sistem pemerintahan di daerah ini.

Dijelaskan dalam (Dehayy et al., 2024) ,Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dalam Republik Indonesia. Pada tahun 1949, Jawa Barat sempat menjadi negara Pasundan sebelum kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. Transformasi ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan perubahan dalam struktur pemerintahan yang terus berkembang.

Gedung sate sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, tidak hanya berfungsi sebagai bangunan administratif tetap juga sebagai simbol kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat sunda seperti nilai-nilai gotong royong dan partisipasi komunitas berperan penting dalam membentuk kebijakan publik dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam melakukan penelitian mengenai transformasi sistem pemerintahan di Jawa Barat dengan fokus pada analisis historis dan kearifan lokal di Gedung Sate penting untuk mengidentifikasi perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Banyak penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Endang Try Setyasih, berfokus pada transformasi digital dalam pemerintahan daerah dengan penekanan pada penerapan teknologi . Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada konteks historis dan kearifan lokal serta bagaimana nilai-nilai tradisional masyarakat Sunda yang diintegrasikan dalam kebijakan pemerintahan, khususnya di Gedung Sate.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Iqbal et al. menyoroti kesenjangan digital dan

tantangan dalam penerapan teknologi tanpa banyak membahas kearifan lokal yang ada. Sedangkan, penelitian ini mengeskloprasi secara mendalam bagaimana kearifan lokal seperti gotong royong dan partisipasi komunitas berperan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan modern.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengintegrasian nilai kearifan lokal ke dalam sistem pemerintahan di Jawa Barat, terutama di Gedung Sate?
2. Bagaimana sejarah transformasi sistem pemerintahan di Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan Gedung Sate?

Dari rumusan masalah tersebut, dapat dijabarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi sistem pemerintahan di Jawa Barat dari perspektif historis serta mengeksplorasi peran dan pengaruh kearifan lokal dalam perkembangan kebijakan administrasi di Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan provinsi. Melalui pendekatan historis, penelitian ini bertujuan untuk memahami perubahan struktur, mekanisme dan dinamika pemerintahan di Jawa Barat dari masa kolonial hingga era modern. Selain itu, penelitian ini berupaya menggali bagaimana nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Barat mempengaruhi kebijakan publik dan praktik birokrasi di Gedung Sate. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara sejarah pemerintahan dan praktik budaya lokal dalam konteks pembangunan pemerintahan daerah yang lebih adaptif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk membahas sejauh mana perubahan pada sistem pemerintahan dari masa ke masa yang terdapat di Gedung Sate berdasarkan historis dan nilai kearifan lokal. Secara umum, Penulis berharap hasil dari penelitian ini akan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem pemerintahan terutama yang ada di Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang akan mengeksplorasi dan memahami fenomena transformasi sistem pemerintahan. Menurut (Moleong, 2005), Pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi lainnya.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kondisi sosial atau fenomena yang sedang diteliti. Sementara itu, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman dan analisis fenomena, sikap serta persepsi. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data tersebut bukan berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur, observasi dan wawancara. Menurut (Aziza, 2017) hal yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan survey lapangan dengan melihat langsung kondisi tempat penelitian, melakukan dokumentasi yaitu dengan mengambil gambar kondisi di tempat penelitian, serta penelaahan lokasi. Selanjutnya peneliti juga melakukan tahap wawancara kepada tour guide yang memandu selama proses penelitian di Gedung Sate. Metode wawancara ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seorang informan. Selanjutnya menurut (Pradikta, n.d.) studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber akademis, dokumen resmi, artikel, dan literatur terkait yang membahas sejarah Gedung Sate, transformasi sistem pemerintahan, serta nilai-nilai kearifan lokal di Jawa Barat.

Menurut (Bappeda et al., 2018) data yang terkumpul akan di analisis menggunakan metode analisis tematik, dengan langkah-langkah analisis seperti pengkodean data dengan mengidentifikasi data yang di peroleh, kategorisasi yaitu mengelompokkan data, triangulasi yaitu memastikan keaslian data dengan membandingkan dengan berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 1980, Gedung Sate yang terletak di Jalan Diponegoro No.22, Bandung adalah kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung Sate dibangun dari tahun 1920 hingga 1924 oleh Ir. J. Gerber dan timnya, termasuk Eh. De Roo dan G. Hendriks, dibawah pengawasan V.L.Sloors dari Gemeebte van Bandoeng.

Pemerintah Hindia Belanda berusaha memindahkan pusat pemerintahan dari Meester Cornelis ke Bandung, membangun Gedung Sate sebagai bagian dari upaya tersebut. Tujuannya adalah untuk menjadikan Bandung sebagai pusat administratif dan militer. Pada awalnya gedung ini berfungsi sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan (*Department Verkeer en Waterstaat*). Hal ini juga merupakan bagian dari kompleks pemerintahan yang lebih besar yang disebut *Gouvernements Bedrijen* (GB).

Gedung sate menggabungkan gaya arsitektur Eropa dan Nusantara. Desain ini menggabungkan elemen *Rennaisance* Italia dan *Moor* Spanyol dengan elemen Asia. Salah satu ciri khas Gedung Sate adalah ornamen di puncak atap yang menyerupai tusuk sate. Ornamen ini terdiri dari enam tusuk sate.

Gedung Sate tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, tetapi juga menjadi tempat wisata yang menarik banyak orang. Di dalam gedung terdapat sistem alarm yang menyala sendiri saat terjadi serangan. Namun, sistem ini hanya dinyalakan sekali selama sepuluh menit. Ritmen visual yang menarik diciptakan oleh penataan bangunan yang simetris dengan elemen lengkungan berulang.. Gedung Sate menunjukkan kekayaan budaya dan sejarah Indonesia selain menjadi simbol kota Bandung. Ini juga merupakan contoh penting dari warisan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Bagian hasil dan pembahasan bisa dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Pemaparan hasil dan pembahasan harus memberikan deskripsi yang jelas dan tepat mengenai temuan penelitian, interpretasi penulis terhadap temuan tersebut, dan kesimpulan yang dapat ditarik. Berikut merupakan gambar Gedung Sate yang menjadi ikon kota Bandung dan provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. Gedung Sate

1) Pengintegrasian nilai kearifan lokal ke dalam sistem pemerintahan

Pertama kali konsep kearifan lokal (local genius) ini menurut Koentjaraningrat yang dikutip Kasiyan dan Ismadi [3] diperkenalkan oleh arkeolog H.G Quaritch Wales dalam tulisannya berjudul “The Making of Greater India: A Study in South-East Asia Culture Change” yang dimuat dalam Journal of the Royal Asiatic Society (1948). Ciri-ciri khas atau yang biasa disebut sebagai ‘pribumi’ itulah, yang oleh Wales diistilahkan ‘local genius’, yang di dalamnya terkandung makna sebagai ‘basic personality of each culture’. Dengan mengacu pendapat Wales mengenai local genius secara luas, dapat diartikan sebagai proses cultural characteristic, yakni perkembangan dari proses fenomenologis ke sifat kognitif, memiliki dasar: 1. Menunjukkan pandangan hidup dan sistem nilai dari masyarakat (orientation). 2. Menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap dunia luar (perception). 3. Mewujudkan tingkah laku masyarakat sehari-hari (attitude dan pattern of life). 4. Mewarisi pola kehidupan masyarakat (life style). (Suriastuti et al., 2014)

1. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Arsitektur Jawa Barat Jawa Barat merupakan wilayah yang ditempati oleh suku Sunda, dengan begitu peninggalan artefak sosial, seni, dan budaya dipengaruhi oleh pola pemikiran dan perilaku dari masyarakat Sunda. Kebudayaan menjadi aspek yang memberi pengaruh besar terhadap pengembangan arsitektur tradisional. Pola hidup masyarakat ikut membentuk arsitektur pemukimannya. Maka dapat disimpulkan bahwa, arsitektur adalah bagian yang integral dari pengembangan kebudayaan, dan kebudayaan menjadi aspek penting dalam wacana arsitektur- interior tradisional. Konsep tradisional menjadi satu istilah yang menekankan aspek kebudayaan sebagai bagian dari sebuah lingkungan binaan.
2. Identitas Kota Bandung Kota Bandung (kotamadya) adalah ibukota provinsi Jawa Barat yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Tata kota awal yang menggunakan model kota Renaisan seperti Paris dikenal sebagai Parijs van Java (bahasa Belanda) atau Paris dari Jawa. Karena terletak di dataran tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa sejuk. Lambang kota Bandung ditetapkan dengan peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 April 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6 Lambang tersebut

berupa perisai yang berbentuk jantung. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah balok-lintang mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna hitam dengan pelisir berwarna putih perak pada pinggir sebelah atasnya.

Kota Bandung dibangun untuk menjadi ibukota kabupaten Bandung oleh Wiranatakusumah II, Bupati Kabupaten Bandung saat itu (1794-1829) atas perintah Gubernur Jenderal Daendels. Sebelumnya, ibu kota kabupaten terletak di Karapyak (sekarang Dayeuhkolot). Bandung kemudian berkembang pesat dan dipersiapkan sebagai ibu kota Hindia Belanda, dengan adanya rencana memindahkan Batavia ke Bandung. Maka, terdapat langkah persiapan yang direncanakan, salah satunya dengan membangun bangunan-bangunan pemerintahan dan pemukiman dengan rencana tata ruang yang baik. (Suriastuti et al., 2014)

2) Sejarah tranformasi sistem pemerintahan

Salah satu bentuk dari pembangunan diantaranya adalah terjadinya proses transformasi pada lingkungan binaan. Dalam ilmu arsitektur dan desain interior, transformasi diartikan sebagai sebuah perubahan fisik yang disebabkan oleh adanya kekuatan non fisik (Rossi, 1982 dalam Sari & Winarso, 2007).

2.1 Transformasi Fisik di Gedung Sate Akibat Pembangunan Museum Gedung Sate

Di dalam bukunya Habraken (1983) menjelaskan bahwa perubahan atau transformasi lingkungan merupakan cara melihat sebuah ‘hukum’ dalam lingkungan binaan. Habraken menjelaskan dan mengkategorikan struktur arsitektural berdasarkan keteraturan yang dapat diamati. Menurutnya lingkungan binaan yang diamati perubahannya selalu memiliki batasan (limitations), disebut sebagai tapak (site) yang dianggap sebagai sebuah bentukan fisik (Bukit, 2012). Tapak yang berbentuk fisik tersebut dikatakan bertransformasi jika mengalami penambahan elemen, pengurangan elemen, atau perubahan posisi. Transformasi fisik yang dimaksud pada penelitian ini merujuk kepada terjadinya salah satu atau lebih perubahan fisik pada area tapak Cagar Budaya, yang secara spesifik dibatasi pada area Museum Gedung Sate, Bandung. Secara lebih spesifik, jika ditinjau dari hirarki level/ tingkatan dalam bahasan pada kategori body & utensils hingga building elements yang secara keseluruhan masuk ke dalam tatanan transformasi fisik

- a) Perubahan Pada Tatanan Body & Utensils dan Furnitur (Interior Arrangement)
- b) Perubahan Partitioning/ Floor Plan Tidak
- c) Perubahan Building Element Elemen

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan informasi mengenai unsur arsitektur Gedung Sate:



Gambar 2. Arsitektur Gedung Sate
Sumber: Dokumentasi Pribadi

2.2 Transformasi Teritorial Pada Area Museum Gedung Sate

Teritori menurut Habraken (1998) adalah space under control atau unit dari sebuah ruang yang memiliki kontrol serta berhubungan dengan pola pelaku dan kepemilikan. Setiap hirarki teritorial memiliki hubungan asimetri dimana di dalamnya kontrol teritorial berada, yaitu kemampuan untuk meniadakan dan mengijinkan siapa yang bisa memasuki atau tidak bisa memasuki sebuah area. Namun, adanya ijin memasuki teritori tersebut tidak semata-mata membuat seseorang diijinkan untuk memasuki teritori berikutnya. Sehingga dalam aturan hirarki teritorial ada yang dinamakan sebagai sebuah teritori asimetri. Maksud dari hirarki asimetri adalah aturan yang memberikan efek adanya hirarki yang bertingkat dalam sebuah area teritori.



Gambar 3. Area Museum Gedung Sate
Sumber: Dokumentasi Pribadi

2.3 Kategorisasi Perubahan Spasial Berdasarkan Fungsi Bangunan

Pembangunan merupakan proses transformasi secara bertumbuh dan merata yang terencana dan berkesinambungan, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat, termasuk proses-proses yang dipengaruhi oleh globalisasi, industrialisasi dan urbanisasi. Pembangunan memiliki tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tingkat keberhasilannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta azas keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Kegiatan pembangunan adalah wujud budaya pada suatu negara. Komunitas, kelompok dan masyarakat sebagai struktur budaya akan memberi corak khusus terhadap pembangunan. Kebudayaan yang dimiliki sebuah kelompok masyarakat merupakan sebuah sistem komunikasi simbolik dimana arsitektur merupakan cerminan atau tanda dari sebuah kebudayaan. (Nold Egenter, 1992, dalam Haristianti, 2016) mengemukakan dua kerangka ilmiah yang berbeda terhadap arsitektur. Arsitektur bisa bersifat sebagai artefak estetis, fungsional dan objektif. Bisa juga menjadi sebuah cerminan budaya dan konstruksi sosial. Ketika arsitektur memiliki peran sebagai sarana budaya, ia menyebabkan image making dan pencitraan muncul. Fungsi Gedung Sate sebagai artefak arsitektur telah mengalami pergeseran.

Terjadi komodifikasi akibat dibangunnya Museum Gedung Sate. Ada sifat ekonomi dan komersial yang terangkat jika dibandingkan dengan sebelum pembangunan. Museum Gedung Sate merupakan salah satu museum terbaru yang dimiliki oleh Kota Bandung dan menyajikan edukasi seputar bangunan Gedung Sate. Jika dulu wisatawan hanya berfoto di depan dan sekitar halaman saja, saat ini mereka bisa mengenal lebih dekat dan belajar lebih banyak tentang Gedung Sate. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri. Adapun tarif tiket masuk adalah sebesar Rp. 5.000. Sejak pembukaan pada Desember 2017 tercatat sudah ada sekitar 148.143 orang yang datang ke Museum ini. Disinyalir jumlah pengunjung saat ini sudah lebih banyak dari jumlah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa

ransformasi yang terjadi memberi dampak pada proses pembangunan.

KESIMPULAN

Transformasi sistem pemerintahan di Jawa Barat khususnya di Gedung Sate yang di jadikan sebagai simbol sejarah, kearifan lokal masyarakat sunda, dan juga sebagai pusat pemerintahan. Analisis historis pada Gedung Sate ini tidak hanya sebagai pusat administrasi pemerintahan pada era kolonial Belanda hingga era Modern, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan politik di Jawa Barat. Transformasi yang terjadi juga melibatkan integrasi nilai kearifan lokal seperti adanya gotong royong dan partisipasi komunitas ke dalam kebijakan publik Yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada aspek budaya, gedung sate memiliki hubungan erat antara arsitektur tradisional sunda dan modern yang menunjukkan identitas masyarakat di Jawa Barat.

Dengan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini dapat menjelaskan proses integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem pemerintahan di Jawa Barat, juga memberikan wawasan penting tentang hubungan antara sejarah pemerintahan, budaya lokal, kebijakan yang inklusif dan adaptif di tingkat daerah. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna terhadap pengembangan kebijakan pemerintahan yang berbasis budaya dan juga teknologi untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, N. (2017). Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 45–54.
- Bappeda, K., Badan, K., Hidup, P. L., Hukum, K. B., Pendidikan, K. D., & Pemerintahan, M. (2018). *Transformasi manajemen pemerintahan di kota bogor dari aspek lingkungan*. 3(1), 120–138.
- Dehayy, A., Nur, I., & Manaf, M. F. (2024). *Transformasi Sosial dan Politik di Jawa Barat : Kajian Sejarah*. 3(6), 201–209.
- Habraken, N.J (1983). *Tranformations of the Built Environment*. Cambridge: MIT Press
- Koentjaraningrat (1948). *The Making of Greater India: A Study in South-East Asia Culture Change*. *Journal of the Royal Asiatic Socuety*.
- Moleong. (2005). Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara dan pengamatan secara mendalam kepada para informannya. *Metode Penelitian Kualitatif*, 48–61.
- Pradikta, B. (n.d.). *Penerapan Model Parlementer*. 1–11.
- Rossi, A (1982). *The Architecture of the City*. Cambridge:MIT Press
- Sari, R., & Winarso, H (2007). *Tranformasi Lingkungan Binaan*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suriastuti, M. Z., Wahjudi, D., & Handoko, B. (2014). Kajian Penerapan Konsep Kearifan Lokal Pada Perancangan Arsitektur Balai kota Bandung. *Jurnal Itenas Rekarupa*, 2(1), 122–128. www.skycrapercity.com